



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- c. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk *expansible polystyrene* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene* (EPS), telah berakhir masa berlakunya dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk *expansible polystyrene*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (*expansible polystyrene*) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 5

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk *expansible polystyrene* dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal importasi produk *expansible polystyrene* berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk *expansible polystyrene* yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk *expansible polystyrene* yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 320

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 2.352,478/kg
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp 2.328,473/kg
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp 2.304,468/kg

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1.	Afghanistan	31.	Djibouti
2.	Albania	32.	Dominica
3.	Angola	33.	Dominican Republic
4.	Antigua and Barbuda	34.	Ecuador
5.	Argentina	35.	Egypt
6.	Armenia	36.	El Salvador
7.	Bahrain, Kingdom of	37.	Eswatini
8.	Bangladesh	38.	Fiji
9.	Barbados	39.	Gabon
10.	Belize	40.	Gambia
11.	Benin	41.	Georgia
12.	Bolivia, Plurinational State of	42.	Ghana
13.	Botswana	43.	Grenada
14.	Brazil	44.	Guatemala
15.	Brunei Darussalam	45.	Guinea
16.	Burkina Faso	46.	Guinea-Bissau
17.	Burundi	47.	Guyana
18.	Cabo Verde	48.	Haiti
19.	Cambodia	49.	Honduras
20.	Cameroon	50.	Hong Kong, China
21.	Central African Republic	51.	India
22.	Chad	52.	Israel
23.	Chile	53.	Jamaica
24.	Colombia	54.	Jordan
25.	Comoros	55.	Kazakhstan
26.	Congo	56.	Kenya
27.	Costa Rica	57.	Korea, Republic of
28.	Côte d'Ivoire	58.	Kuwait, the State of
29.	Cuba	59.	Kyrgyz Republic
30.	Democratic Republic of the Congo	60.	Lao People's Democratic Republic

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
61.	Lesotho	92.	Russian Federation
62.	Liberia	93.	Rwanda
63.	Macao, China	94.	Saint Kitts and Nevis
64.	Madagascar	95.	Saint Lucia
65.	Malawi	96.	Saint Vincent and the Grenadines
66.	Malaysia	97.	Samoa
67.	Maldives	98.	Saudi Arabia, Kingdom of
68.	Mali	99.	Senegal
69.	Mauritania	100.	Seychelles
70.	Mauritius	101.	Sierra Leone
71.	Mexico	102.	Singapore
72.	Moldova, Republic of	103.	Solomon Islands
73.	Mongolia	104.	South Africa
74.	Montenegro	105.	Sri Lanka
75.	Morocco	106.	Suriname
76.	Mozambique	107.	Tajikistan
77.	Myanmar	108.	Tanzania
78.	Namibia	109.	Thailand
79.	Nepal	110.	Timor-Leste
80.	Nicaragua	111.	Togo
81.	Niger	112.	Tonga
82.	Nigeria	113.	Trinidad and Tobago
83.	North Macedonia	114.	Tunisia
84.	Oman	115.	Türkiye
85.	Pakistan	116.	Uganda
86.	Panama	117.	Ukraine
87.	Papua New Guinea	118.	United Arab Emirates
88.	Paraguay	119.	Uruguay
89.	Peru	120.	Vanuatu
90.	Philippines	121.	Venezuela, Bolivarian Republic of
91.	Qatar	122.	Yemen

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
123.	Zambia	124	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2025
ABOUT
IMPOSITION OF IMPORT DUTY AS A SAFEGUARD MEASURE
ON IMPORTS OF *EXPANSIBLE POLYSTYRENE* PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: a. that Indonesia as a member country of the World Trade Organization *is* obliged to play an active role in realizing a fair world trade order;

b. that based on the provisions of Article 70 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures and Trade Safeguard Measures, imported goods in addition to being subject to import duties may be subject to safeguard measures if there is an absolute or relative spike in the number of imports of goods that are the same as similar goods or goods that directly compete and the spike in the number of imports causes serious losses or the threat of serious losses to the domestic industry;

c. that the imposition of safeguard import duties on imports of *expansible polystyrene* products as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 174/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Safeguard Import Duties on Imports of *Expansible Polystyrene* (EPS) Products has expired and the domestic industry still needs additional time to complete structural adjustments, so it is necessary to extend the imposition of safeguard import duties on imported goods in the form of *expansible polystyrene products*;

d. that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, and to implement the provisions of Article 23D paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning the Imposition of Safeguard Import Duty on Imports of *Expansible Polystyrene Products*;

Considering: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

- 2. Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
- 3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
- 4. Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures (State Gazette of the Republic of Indonesia 2011 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5225);
- 5. Presidential Regulation Number 158 of 2024 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 354);
- 6. Regulation of the Minister of Finance Number 124 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 1063);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING THE IMPOSITION OF SAFEGUARD IMPORT DUTY ON IMPORTS OF *EXPANSIBLE POLYSTYRENE PRODUCTS*.

article 1

In this Ministerial Regulation, what is meant by Safeguard Import Duty is a state levy to restore serious losses or prevent the threat of serious losses suffered by domestic industry as a result of a surge in the number of imported goods against similar goods or goods that directly compete with each other with the aim that domestic industry that experiences serious losses or the threat of serious losses can make the necessary adjustments.

Article 2

Imports of expandable polystyrene products *in* the form of granules included in tariff item 3903.11.10 are subject to Safeguard Import Duty.

Article 3

The Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 2 is imposed for 3 (three) years with the Safeguard Measures Import Duty rate as stated in Attachment letter A which is an integral part of this Ministerial Regulation.

Article 4

The imposition of Safeguard Import Duty as referred to in Article 2 is in addition to:

- a. general import duties (*most favored nation*); or
- b. preferential import duties based on international agreements or deals,

that has been imposed.

Article 5

- (1) Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 2 is imposed on imports of *expansible polystyrene* products from all countries.
- (2) The imposition of Safeguard Measures Import Duty as referred to in paragraph (1) is exempted from imports of *expansible polystyrene* products originating from countries as listed in Attachment letter B which is an integral part of this Ministerial Regulation.

Article 6

- (1) Importers are required to submit a certificate *of origin* document for imports of *expansible polystyrene* products originating from countries that are exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 5 paragraph (2).
- (2) In the case where the importer as referred to in paragraph (1) uses a preferential certificate *of origin* , the imported goods must meet the provisions of origin of goods based on the provisions of laws and regulations governing the imposition of import duty rates on imported goods based on international agreements or agreements.
- (3) The provisions of origin of goods as referred to in paragraph (2) must fulfill:
 - a. origin criteria ;
 - b. consignment criteria ; and
 - c. procedural provisions .
- (4) Research into the certificate *of origin* of preference as referred to in paragraph (2) is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations governing the imposition of import duty rates on imported goods based on international agreements or agreements.
- (5) In the case where the importer as referred to in paragraph (1) uses a non-preferential certificate *of origin* , research into the non-preferential certificate *of origin* is carried out based on the provisions of laws and regulations in the trade sector.

Article 7

- (1) In the case of importing *expansible polystyrene* products originating from countries exempted from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 5 paragraph (2) do not fulfill the provisions as referred to in Article 6 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (5), Safeguard Measures Import Duty will be levied on such imports.
- (2) In the event that a request for a *retroactive check* is being made to *the certificate of origin* as referred to in Article 6 paragraph (2) , imports of *expansible polystyrene* products originating from countries exempted from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 5 paragraph (2) shall be subject to Safeguard Measures Import Duty.

Article 8

- (1) The amount of Safeguard Measures Import Duty as referred to in Article 3 applies to imported *expansible polystyrene* products which:
 - a. the import customs notification document has received a registration number from the customs office where the customs obligations are settled, in the case where the settlement of customs obligations is carried out by submitting a customs notification; or
 - b. the tariff and customs value are determined by the customs office where the customs obligations are settled, in the case where the customs obligations are settled without submitting a customs notification.
- (2) The entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones, is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations governing the entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones.

Article 9

This Ministerial Regulation shall come into force after 7 (seven) working days from the date of promulgation.

In order for everyone to know, I order the promulgation of this Ministerial Regulation by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.



Established in Jakarta on May
5, 2025

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



SRI MULYANI INDRAWATI

Promulgated in Jakarta on ̣̣

DIRECTOR GENERAL
LEGISLATION
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

̣̣

DHAHANA PUTRA

STATE NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2025 NUMBER ̣̣

ATTACHMENT
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2025
ABOUT
IMPOSITION OF IMPORT DUTY AS A SAFEGUARD MEASURE
ON IMPORTS OF *EXPANSIBLE POLYSTYRENE* PRODUCTS

A. AMOUNT OF IMPORT DUTY TARIFFS FOR SAFEGUARD MEASURES

No.	Imposition Period	Import Duty Amount Action Security
1.	First Year, with a period of 1 (one) year starting from the effective date of this Ministerial Regulation.	Rp 2,352,478/kg
2.	Second Year, with a period of 1 (one) year calculated after the end date of the First Year.	Rp. 2,328,473/kg
3.	Third Year, with a period of 1 (one) year calculated after the end date of the Second Year.	Rp. 2,304,468/kg

B. LIST OF DEVELOPING WTO MEMBER COUNTRIES EXEMPT FROM THE IMPOSITION OF
SAFEGUARD MEASURE IMPORT DUTY ON IMPORTS OF *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*
PRODUCTS

No.	Country Name	No.	Country Name
1.	Afghanistan	31.	Djibouti
2.	Albania	32.	Dominica
3.	Angola	33.	Dominican Republic
4.	Antigua and Barbuda	34.	Ecuador
5.	Argentina	35.	Egypt
6.	Armenia	36.	El Salvador
7.	Bahrain, Kingdom of	37.	Swaziland
8.	Bangladesh	38.	Fiji
9.	Barbados	39.	Gabon
10.	Belize	40.	Gambia
11.	Benin	41.	Georgia
12.	Bolivia, Plurinational State of	42.	Ghana
13.	Botswana	43.	Grenada
14.	Brazil	44.	Guatemala
15.	Brunei Darussalam	45.	Guinea
16.	Burkina Faso	46.	Guinea Bissau
17.	Burundi	47.	Guyana
18.	Cabo Verde	48.	Haiti
19.	Cambodia	49.	Honduras
20.	Cameroon	50.	Hong Kong, China
21.	Central African Republic	51.	India
22.	Chad	52.	Israel
23.	Chile	53.	Jamaica
24.	Colombia	54.	Jordan
25.	Comoros	55.	Kazakhstan
26.	Congo	56.	Kenya
27.	Costa Rica	57.	Korea, Republic of
28.	Côte d'Ivoire	58.	Kuwait, the State of
29.	Cuba	59.	Kyrgyz Republic Lao
30.	Democratic Republic of the Congo	60.	People's Democratic Republic

No.	Country Name	No.	Country Name
61.	Lesotho	92.	Russian Federation
62.	Liberia	93.	Rwanda
63.	Macao, China	94.	Saint Kitts and Nevis
64.	Madagascar	95.	Saint Lucia
65.	Malawi	96.	Saint Vincent and the Grenadines
66.	Malaysia	97.	Samoa
67.	Maldives	98.	Saudi Arabia, Kingdom of
68.	Mali	99.	Senegal
69.	Mauritania	100.	Seychelles
70.	Mauritius	101.	Sierra Leone
71.	Mexico	102.	Singapore
72.	Moldova, Republic of	103.	Solomon Islands
73.	Mongolia	104.	South Africa
74.	Montenegro	105.	Sri Lanka
75.	Morocco	106.	Suriname
76.	Mozambique	107.	Tajikistan
77.	Myanmar	108.	Tanzania
78.	Namibia	109.	Thailand
79.	Nepal	110.	East Timor
80.	Nicaragua	111.	Togo
81.	Nigeria	112.	Tonga
82.	Nigeria	113.	Trinidad and Tobago
83.	North Macedonia	114.	Tunisia
84.	Oman	115.	Turkish
85.	Pakistan	116.	Uganda
86.	Panama	117.	Ukraine
87.	Papua New Guinea	118.	United Arab Emirates
88.	Paraguay	119.	Uruguay
89.	Peru	120.	Vanuatu
90.	Philippines	121.	Venezuela, Bolivarian Republic of
91.	Qatar	122.	Yemen

No.	Country Name	No.	Country Name
123.	Zambia	124	Zimbabwe

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI